

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*. Edisi Kedua, Cet. II, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2017.
- Achmad Ruslan, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Rangkang Education, Yogyakarta, Cet. Ketiga, Edisi Revisi, 2021.
- _____, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas*, PT. Bina Rewa Pariwara, Jakarta, 2006.
- Arfin dan Leonarda Sambas K, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2016.
- Aziz Syamsuddin, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Edisi ke-2 Cet. Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta. 2003.
- Bayu Dwi Anggono, *Pokok-Pokok Pemikiran Penataan peraturab Perundang-Undangan di Indonesia*, Konstitusi Perss. Jakarta, 2020.
- Enny Nurbaningsih, *Problematika Pembentukan Peraturan Daerah; Aktualisasi wewenang Mengatur dalam Era Otonomi Luas*, PT. Raja Grafindo Persada. Depok, 2019.
- Erina Pane, *Legal Drafting*, Harakindo Publishing, Bandar Lampung, 2019.
- Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putra, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teortis & Praktis Disertasi Manual) Konsepsi Teortis Menuju Artikulasi Empiris*. Kenacana, Jakarta, 2009.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media Jakarta, 2011.
- Irsyadi Ramdhany, *Peraturan Daerah: Kajian Teoritisi Menuju Artikulasi Empiris*, Trussmedia Publishing, Yogyakarta, 2015.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2020.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cet. Kedua, Setjen Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006.

- _____, *Perihal Undang-Undang*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Jonhy Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2012.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. Kedua, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002
- Kusnu Goesniadhie S., *Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*, Nasa Media. Malang, 2010.
- Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Muh. Hasrul dan Syafaat Anugrah Pradana, *Urgensi Staf Ahli; Kajian Teoritik Keberadaan Staf Ahli sebagai Pembantu Kepala Daerah dalam Penanganan Isu-Isu Stratgis Daerah*, edisi revisi, Litera, Yogyakarta, 2019.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Patawari, *Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Intelegensia Media, Malang, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-12, Kencana, Jakarta, 2016.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers. Jakarta, 2014.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Satjipta Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Siti Zuhro dan Eko Prasajo, *Kisruh Peraturan Daerah: Mengurai Masalah dan Solusinya*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2010.
- Sirajuddin, dkk., *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Malang Corruption Watch, Malang, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, edisi kedua, Liberty, Yogyakarta, 2016.

Teguh Prasetyo, dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum; Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012.

Victor Imanuel W. Nalle, *Ilmu Perundang-Undangan*, Suluh Media, Yogyakarta, 2017.

Widodo Ekathahjana, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dan sistem peradilanannya di Indonesia*, Pustaka Sutra, Jakarta, 2008.

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang yang Berkelanjutan*, Rajawali Pers. Jakarta, 2009.

Jurnal Ilmiah

Achmad Ruslan, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Kualitas Produk Hukumnya*, Jurnal Ammana Gappa, Vol. 13 No. 2 Juni 2005.

Aristo Evandi A. Barlian, *Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan dalam Perspektif Politik Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, Fiat Justisia Vol. 10 No. 4, Oktober-Desember 2016.

Basri Mulyani, *Dekonstruksi Pengawasan Peraturan Daerah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Fakultas Hukum Universitas Rinjani, JURIDICA, Volume 2 Nomor 1, November 2020.

Firdaus Donny Michael, *Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Nonkementerian Atau Rancangan Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19 No. 3, September 2019.

Fitriani Ahlan Syarif, *Gaya Perumusan Kalimat Perintah Pembentukan Peraturan yang Menjalankan Delegasi dari Undang-Undang di Indonesia*. Jurnal Pakuan Law Review Vol. 3 Nomor 2, Juli-Desember 2017.

Hamdan Zoelva. (2015). *Prospek Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Realita*, Jurnal Hasanuddin Law Review. Volume 1 Nomor 2.

Hermi Sari BN, et.al., *Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Eksekutif oleh Kementerian Hukum dan HAM*, Fakultas

- Hukum Universitas Mataram, Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol. 22, No. 2, Desember 2020.
- Kusnu Goesniadhie S., *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan*, Jurnal Hukum, No. 27 Vol. 11 September 2004.
- Marthen Arie, *Pendekatan Legisprudence dalam Menilai Kualitas Peraturan Perundang-Undangan*, Harlev, Vol. 2 Edisi 3, Desember 2016.
- Marwan, *Hakikat Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif*, Disertasi, Universitas Hasanuddin, 2017.
- Mumu Muhajir, et.al., *Harmonisasi Regulasi dan Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam di Indonesia*, Jurnal Anti Korupsi Integritas.
- Ni'matul Huda, *Hubungan Pengawasan Produk Hukum Daerah antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2009.
- Romi Librayanto, *Sistem Norma Hukum dalam Mewujudkan Rumusan Norma Hukum Yang Ideal (Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan di Indonesia)*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2016.
- Prosiding, *Konferensi Nasional Hukum Tata Negara; Penataan Regulasi di Indonesia*, Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember. 2017.
- Sugiyono, *Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Pusat kajian Kebijakan dan Hukum Kedirgantaraan.
- Syahlan, *Rekonstruksi Penataan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, Wacana Hukum Vol. 25, No. 1, Desember 2019.
- A.A Oka Mahendra, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan*, Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta, 2010. <http://ditjenpp.kemenumham.go.id> diakses 5 Oktober 2020.
- Adelia Prihastuti, *Sosialisasai UU Nomor 15 Tahun 2019, Kemenumham jadi Harmonisator Instansi Daerah dan Instansi Vertikal*, <https://jateng.tribunnews.com>, diakses pada 10 Maret 2021.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, *Tiga Dekade Prolegnas dan Peran BPHN*, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Jakarta, 2008.

Direktorat Pendapatan Kapasitas Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI, *Buku Pedoman Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, tahun 2016, 2017, 2018, 2019. <https://sulsel.kemenkumham.go.id>.

Peraturan Perundang-Perundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengadaan, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.